

# LPEM FEB UI: Presidensi G20 Menjadi Momentum Tepat untuk Atur Ulang Fokus Pembangunan Jangka Panjang

JAKARTA, 4 November 2021, LPEM FEB UI telah melakukan konferensi pers pada 2 November lalu bertajuk “**Indonesia Economic Outlook 2022 dan Rencana Presidensi Indonesia untuk G20 2022**” dalam rangka menyajikan hasil analisis Kelompok Kajian Makroekonomi dan Ekonomi Politik LPEM FEB UI. Analisis ini membahas perkembangan kondisi ekonomi dalam kuartal terakhir dan juga proyeksi kondisi perekonomian di kuartal selanjutnya, yaitu kuartal ketiga di tahun 2021. **Kepala Kajian Makroekonomi dan Ekonomi Politik LPEM FEB UI, Jahen F. Rezki**, menjabarkan paparan terkait Indonesia Economic Outlook 2022 bersama dengan **Teuku Riefky, Peneliti Tim Makroekonomi LPEM FEB UI**. Selain itu, **Alin Halimatussadiah, Kepala Kajian Ekonomi Lingkungan LPEM FEB UI** dan **Faradina Alifia Maizar, Peneliti Tim Makroekonomi LPEM FEB UI** memaparkan rencana presidensi Indonesia untuk penyelenggaraan G20 di tahun 2022.

## **Estimasi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia pada Q3 2021**

Menimbang kondisi terkini, Jahen dan Riefky mewakili Tim Makroekonomi LPEM FEB UI menyampaikan bahwa Indonesia nampaknya masih belum akan mencapai tingkat pertumbuhan PDB pra-pandemi yaitu kisaran 5% di 2021. Salah satu faktor utama yang berperan adalah terjadinya gelombang baru Covid-19 yang disebabkan oleh munculnya Varian Delta. Gelombang baru ini telah mendorong lonjakan angka kasus harian yang mendorong regulator untuk kembali melakukan pengetatan pembatasan sosial di periode Juli hingga Agustus 2021. LPEM FEB UI berpandangan bahwa akan terjadi penurunan tingkat pertumbuhan PDB di Triwulan III-2021 ke kisaran 4,1% (y.o.y) (estimasi kisaran dari 3,9% hingga 4,3%) dan kembali meningkat di triwulan akhir tahun 2021; dengan prediksi pertumbuhan ekonomi FY 2021 mencapai 3,8% (y.o.y) (kisaran 3,7% hingga 3,9%). Namun, peningkatan aktivitas ekonomi secara cepat pasca pelonggaran pembatasan sosial memunculkan risiko akan terjadinya lonjakan kasus di akhir tahun. Apabila skenario ini terealisasi, maka *rebound* di Triwulan IV-2021 sulit terjadi dan menekan lebih jauh angka pertumbuhan ekonomi untuk keseluruhan tahun 2021.

Menjaga kewaspadaan akan risiko penyebaran Covid-19 dengan menerapkan protokol kesehatan dan mempercepat tingkat vaksinasi merupakan kunci untuk menopang pertumbuhan ekonomi dalam kondisi hidup berdampingan dengan pandemi. Berhasil kembalinya tingkat pertumbuhan ekonomi ke level pra-pandemi di 2022 akan tergantung dari seberapa sukses pemerintah dan masyarakat mencapai kedua hal tersebut, terlepas dengan berbagai ketidakpastian yang muncul. Bila berhasil, PDB diproyeksi mampu mencapai tingkat pertumbuhan di kisaran 5,1%-5,4% di tahun 2022.

## **Presidensi G20 Indonesia di Tahun 2022**

Faradina melanjutkan pemaparan dengan menyampaikan bahwa Presidensi G20 2022 di Indonesia dapat menjadi momentum yang tepat untuk pemerintah Indonesia mengatur ulang fokusnya dalam agenda pembangunan jangka panjang sembari memfasilitasi diskusi antar pemimpin negara terkait pemulihan global yang lebih kuat dan merata. Dengan mengusung tema “*Recover Together, Recover Stronger*”, kepresidenan G20 Indonesia pada tahun 2022 akan berperan penting untuk menyelaraskan kembali agenda pemulihan Covid-19. Indonesia memiliki kesempatan untuk memimpin negara G20 dalam menyelaraskan beberapa isu global dan regional. “Meski demikian, dalam persiapan presidensi forum diskusi para pemimpin global tahun depan, Indonesia masih menghadapi tantangan dalam urusan dalam negeri. Urgensi dan komitmen perbaikan kondisi sosial ekonomi domestik harus diimbangi dengan tingkat antusiasme dan upaya yang sama dalam memfasilitasi diskusi untuk membangun kembali kondisi global yang lebih baik dan lebih kuat di antara para pemimpin global tahun depan.” ujar Faradina.

## **Peningkatan Produktivitas**

Kedepannya, kebutuhan Indonesia untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja semakin relevan. Faradina menekankan bahwa produktivitas tenaga kerja merupakan salah satu prasyarat untuk pertumbuhan output dan peningkatan kesejahteraan. Meskipun demikian, produktivitas tenaga kerja masih menjadi masalah utama di Indonesia. “Produktivitas

tenaga kerja yang rendah dapat menjelaskan kesenjangan PDB Indonesia dibandingkan dengan anggota G20 lainnya, menunjukkan pentingnya langkah serius menuju reformasi struktural di bidang pendidikan, investasi, dan pasar tenaga kerja.” tegas Faradina. Selain itu, Indonesia masih menghadapi beberapa tantangan terkait ketenagakerjaan. Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia kerja (EPR) lebih tinggi untuk laki-laki daripada perempuan menurut Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) 2020. Ini bisa berarti bahwa perempuan masih kurang terwakili di pasar tenaga kerja dan *gender barriers* masih ada. Penduduk yang bekerja di sektor informal pada tahun 2020 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2019, yaitu sebesar 4,59%. Lebih lanjut, penduduk usia muda yang berada di luar sistem pendidikan dan tidak bekerja adalah 24,28% pada tahun 2020 dan lebih tinggi untuk perempuan daripada laki-laki. Sakernas 2020 juga menunjukkan bahwa tingkat pengangguran terbuka bagi penduduk usia muda mencapai 20,46%. Artinya, dari 100 angkatan kerja muda di Indonesia, ada sekitar 20 orang yang termasuk dalam kategori pengangguran, di mana pengangguran terbuka perempuan muda lebih tinggi daripada laki-laki muda. Pemerintah Indonesia, bersama dengan pemangku kepentingan terkait, seperti serikat pekerja, dan sektor swasta, harus benar-benar melakukan tindakan untuk mengatasi kesetaraan gender dan pengangguran muda.

### **Meningkatkan Daya Tahan dan Stabilitas**

Pandemi Covid-19 telah memberikan tekanan besar pada aspek sosio-ekonomi masyarakat di seluruh dunia. Fokus pada peningkatan stabilitas harus menjadi prioritas kedepannya sesuai dengan semangat “*recover together, recover stronger*”. Adapun dampak dari pandemi yang cukup signifikan akhirnya memaksa pemerintah dari berbagai negara untuk mengeluarkan stimulus dalam jumlah masif sebagai usaha dalam menekan laju infeksi sekaligus menjaga daya beli masyarakat utamanya golongan menengah ke bawah. “Kebutuhan untuk mengeluarkan stimulus ekonomi memaksa Pemerintah Indonesia untuk menggunakan akumulasi utang publik yang berakibat pada peningkatan proporsi pembayaran bunga dalam belanja anggaran negara.” tambah Faradina. Banyak faktor yang mempengaruhi kapasitas fiskal Indonesia, mulai dari rasio pajak yang rendah (8,33% dari PDB pada tahun 2020) hingga kekakuan dalam proses realokasi pengeluaran. Selain itu, rendahnya perkembangan pasar keuangan pun menjadi salah satu tantangan utama yang dihadapi ketahanan anggaran ke depannya. Dari sisi stabilitas keuangan, keterbatasan kemampuan BI untuk menerapkan kebijakan moneter kontraktif tanpa mengganggu pemulihan sektor riil dan tingginya proporsi utang luar negeri juga menjadi tantangan dalam mencapai ketahanan dalam jangka pendek.

### **Memastikan Pertumbuhan yang Berkelanjutan dan Inklusif**

Faradina berpendapat bahwa pandemi merupakan “*blessing in disguise*” dimana adanya kebijakan pembatasan sosial berdampak baik pada lingkungan dalam bentuk berkurangnya emisi karbon dan polusi yang udara. Adapun momen ini sebenarnya dapat dimanfaatkan dalam mengintegrasikan rencana pemulihan dengan pembangunan hijau yang berkelanjutan. Karena selain pandemi, dunia juga sedang menghadapi dampak dari perubahan iklim yang berpotensi mendatangkan kerugian lain seperti bencana alam. Beberapa hal yang bisa dilakukan pemerintah dalam menghadapi pandemi sembari juga mengatasi isu perubahan iklim seperti meningkatkan investasi hijau untuk menciptakan lapangan pekerjaan. “Studi dari ILO tahun 2018 menunjukkan bahwa berinvestasi pada sektor hijau dapat mengurangi peningkatan suhu hingga 2°C sehingga menciptakan peningkatan bersih 14 juta pekerjaan”, ujar Faradina. Selain itu, pemerintah juga harus mendorong bauran energi untuk mendorong konsumsi energi baru terbarukan serta menerapkan sistem keuangan hijau dan mendorong PMA ramah lingkungan yang diharapkan dapat mengurangi intensif karbon dan meningkatkan transfer teknologi hijau. Terakhir, pemerintah perlu melakukan dekarbonasi ekonomi untuk menciptakan ruang fiskal dan mengurangi emisi karbon melalui penghapusan subsidi bahan bakar fosil dan penerapan pajak karbon.

“Selain pertumbuhan berkelanjutan, Indonesia juga perlu mendorong pertumbuhan yang inklusif”, ujar Faradina. Lebih jauh Faradina menekankan bahwa kebijakan fiskal sudah memberikan kontribusi yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi namun kurang berhasil memberikan manfaat yang lebih luas ke seluruh lapisan masyarakat. Hal ini dapat terlihat dari rasio Gini rata-rata sebesar 0,41 selama 2011-2015. Namun, sejak tahun 2016 koefisien Gini menurun hingga mencapai 0,39 di tahun 2019. Adapun hal tersebut didukung oleh peningkatan yang progresif untuk belanja bantuan sosial. Melihat lebih dalam, kualitas belanja telah meningkat secara bertahap dan bergeser ke bidang-bidang yang lebih inklusif terutama pada

infrastruktur dan perlindungan sosial. Belanja infrastruktur juga didukung oleh pihak swasta dalam bentuk PPP yang kemudian diharapkan dapat memperkecil kesenjangan antar daerah. Untuk belanja kesehatan dibanding negara lain, proporsi Indonesia masih lebih kecil. Hal ini kemudian berimplikasi pada kualitas kesehatan yang tercermin melalui angka harapan hidup yang mencapai 71 tahun atau 5 tahun lebih rendah dibanding negara Asia-Pasifik lainnya. Sementara itu, belanja pendidikan belum menunjukkan hasil yang signifikan terhadap kualitas pendidikan terutama dari segi kualitas. Dalam hal kualitas pendidikan, berdasarkan Human Capital Index (HCI), Indonesia masih lebih rendah yakni sebesar 0,54 dibanding negara tetangga lainnya seperti Vietnam (0,69), Malaysia (0,61), dan Thailand (0,61).

### **Iklm Ekonomi dan Kolaborasi yang Mendukung**

Salah satu isu dalam kerja sama Indonesia adalah terkait dengan investasi. “Padahal investasi penting dalam pembangunan karena mendorong transfer teknologi antar negara”, ujar Faradina. Faradina juga menambahkan bahwa investasi ke sektor riil melalui penanaman modal asing juga dapat menciptakan lapangan kerja yang lebih luas. Beberapa hal yang perlu diperbaiki dari segi investasi salah satunya adalah ketertutupan. Dilihat dari FDI Restrictiveness Index, Indonesia memiliki skor 0,35 atau paling tertutup di antara negara G20 lainnya. Hal ini dapat diartikan bahwa terdapat hambatan serius dalam agenda pemulihan ekonomi di jangka pendek dan pertumbuhan ekonomi di jangka panjang. Lebih jauh Faradina juga menunjukkan indeks pengentasan korupsi dan indeks supremasi hukum. “Indonesia memiliki kinerja moderat dibanding dengan negara berpendapatan menengah ke bawah namun masih di bawah rata-rata negara lainnya”, ujar Faradina terkait dengan kedua indeks tersebut.

### **Mencapai Kepemimpinan Kolektif Global**

Faradina berpendapat tiga agenda yang dapat diusung Indonesia dalam presidensi G20. ujar Faradina. Pertama adalah terkait dengan komitmen luar biasa dan kuat terkait dengan aspek kesehatan sehingga tidak ada negara berkembang yang terlewat dari agenda pemulihan. Selain aspek kesehatan, ada juga aspek digitalisasi. “Jadi dalam forum G20, Indonesia bisa mengarahkan diskusi ke arah reformasi regulasi teknis di beberapa aspek seperti kebijakan privasi dan kebijakan persaingan nasional”, tambah Faradina. Terakhir adalah terkait dengan perpajakan dimana di era digital saat ini sudah ada 136 negara yang sepakat mendukung Two-pillar Solutions yang menetapkan tarif pajak minimum bagi perusahaan multinasional. “Diharapkan bahwa dengan adanya forum G20 makin banyak negara lain untuk ikut serta sehingga negara-negara anggota memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan dan mempromosikan reformasi pajak dengan menciptakan kepemimpinan kolektif di antara negara-negara G20. Hal ini dimaksudkan untuk mengembangkan pengetahuan dan kapasitas yang setara dalam membebaskan perusahaan multinasional di era digital.” tutup Faradina.